



LKjIP 2023

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan Rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKjIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023.

Kami menyadari LKjIP ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah-mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Geragai, Februari 2024

KEPALA DINAS



AGUS SADIKIN

Penyelia Utama Muda, (IV/c)

NIP. 196605061985121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diamanatkan agar setiap penyelenggara Pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada Instansi yang lebih tinggi. Penerapan Manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Sumber Dana dan Sumber Daya Manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan Kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 19 (Sembilan Belas) arah kebijakan dan 5 (Lima) Sasaran strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya didukung oleh 6 (enam) program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan. Sasaran Kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2023, dan semuanya telah terlaksana.

Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, dengan persentase realisasi Belanja Daerah 93,63% dan Belanja Operasi Realisasi sebesar 93,58% serta Belanja Modal dengan Realisasi sebesar 94,94%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program, Kegiatan dan sub Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, didukung dengan Dana sejumlah Rp. 10.601.134.092 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 10.203.936.779 (93,58) dan Belanja Modal sebesar Rp. 397.197.313 (94,94). Bila dibandingkan antara Belanja Operasi dan Belanja Modal, maka hampir keseluruhan besar dana APBD digunakan sebagai belanja Operasi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 sudah terlaksana dengan baik. Realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 9.925.791.473 (93,63) terbagi ke dalam 2 Jenis Belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.548.707.473 (93,58%) dan Realisasi Belanja Modal Rp. 377.084.000 (94,94%). Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 memiliki 6 Program, 18 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Dengan Demikian, sisa Dana Belanja Operasi sebesar Rp. 655.229.306 (6,40%), Belanja Operasi terdiri dari (1) Belanja

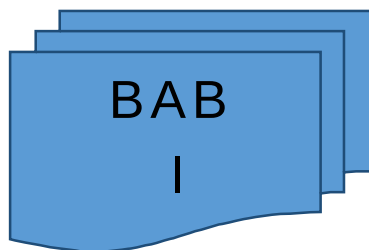
Pegawai dengan sisa Anggaran Rp. 163.551.005 (4,26%) (2) Belanja Barang dan Jasa dengan Sisa Anggaran Rp. 483.331.301 (8,70%) (3) Belanja Hibah dengan Sisa Anggaran Rp. 8.347.000 (1,03%) dan Belanja Modal dengan Sisa Anggaran Rp. 20.113.313 (5,06%).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 8.470.000 (8,12%) dari pagu yang ditargetkan sebesar Rp. 104.368.000 yang terdiri dari (1) Pendapatan Retribusi Daerah dengan Jumlah Anggaran Rp. 4.368.000 dengan Realisasi Rp. 800.000 (18,32%) (2) Lain-lain PAD yang Sah dengan Jumlah Anggaran Rp.100.000.000 dan Realisasi Rp. 7.670.000 (7,67%). Sampai Bulan Desember 2023, Laporan Neraca per 31 Desember 2023, Jumlah Aset Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar Rp....(Belum Selesai Rekon Neraca per 31 Desember 2023).

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya. Agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang, maka LKjIP ini perlu dipahami dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh semua staf di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif	li
Daftar Isi	V
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2021-2026	21
1. Pernyataan Visi	22
2. Pernyataan Misi	23
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
4. Program dan Kegiatan	25
5. Sasaran Program	29
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	31
B. Analisis Capaian Kinerja	39
C. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	48



PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengarahkan, menetapkan arah kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati tersebut diatas dinyatakan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten TanjungJabungTimur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan Peternakan;
- b. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Produksi Perkebunan, Usaha dan Sarana Usaha Perkebunan;
- c. Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan
- d. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Produksi Ternak serta Pengawasan terhadap mutu, peredaran dan Pengendalian Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
- e. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Umum Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan dan Peternakan;
- g. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan
- h. Pelaksanaan Fungsi Lain yang terkait bidang Perkebunan dan Peternakan yang diberikan oleh Bupati.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategis harus memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Aspek Strategis meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai berikut:

Peternakan Sasaran Pembangunan Daerahnya yakni: Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis. Dengan Strategi Pembangunan Daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Adapun strategi yang dimaksud adalah Peningkatan Produksi Daging untuk sub sektor peternakan dan Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan untuk sub sektor perkebunan.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki oleh

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada Mengoptimalkan produksi ternak melalui balai benih ternak, IB dan Pelayanan Keswan serta Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan melalui Ketersediaan Benih Perkebunan, Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM) serta Jalan Produksi.

Dalam mewujudkan Misi Kedua, maka program pembangunan yang akan dilakukan ada 6 Program adalah:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- c) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- d) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- f) Program Penyuluhan Pertanian

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan;

- c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perkebunan dan peternakan yang diberikan oleh Bupati.

Guna memudahkan aparaturnya Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugasnya, maka uraian tugas pokok dan fungsi dijabarkan dalam beberapa bagian, yakni tugas pokok dan fungsi tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian, dan Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dalam gambar 1.1 Struktur Organisasi.



Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas;
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- III. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 3. Seksi Perbenihan.

IV. Bidang Perlindungan, terdiri atas:

1. Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman;
2. Seksi Kelembagaan; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

V. Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan, terdiri atas:

1. Seksi Kawasan dan Perbibitan;
2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan; dan
3. Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP.

VI. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, terdiri atas:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

VIII. UPTD.



Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas :
Pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- Sekretariat melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pengelolaan urusan umum.

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
- h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

II. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

III. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.



Bidang Perkebunan

- Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan.

- Bidang Perkebunan melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis penyuluhan budidaya, penerapan dan pengujian teknologi peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (rekomtek) pemberian izin usaha perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengembangan pengelolaan lahan dan air serta jalan produksi kawasan perkebunan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi perkebunan serta monitoring dan pengawasannya.
 - e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap usaha perkebunan, usaha agribisnis perkebunan dan industri perkebunan;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
 - h. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;

I. Seksi Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan bimbingan teknis penyuluhan budidaya, penerapan dan pengujian teknologi peningkatan mutu dan produksi perkebunan, pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (rekomtek) pemberian izin usaha perkebunan, pengembangan pengelolaan lahan dan air serta jalan produksi kawasan perkebunan serta koordinasi penyediaan kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi perkebunan serta monitoring dan pengawasannya.

II. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pengawasan, monitoring dan pembinaan terhadap usaha perkebunan, usaha agribisnis perkebunan dan industri perkebunan.

III. Seksi Perbenihan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di tanaman perkebunan serta pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan.



Bidang Perlindungan

- Bidang Perlindungan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan serta pembinaan kelembagaan petani perkebunan dan peternak.

- Bidang Perlindungan melaksanakan fungsi sebagaimana berikut :
 - a. pelaksanaan koordinasi perlindungan keberadaan kawasan hidrologis gambut;
 - b. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan perkebunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pendataan, pembinaan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan dan peternak;
- f. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi lahan perkebunan rakyat;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan rehabilitasi lahan dan perkebunan yang terkena kebakaran;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi Teknis Analisa mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan perkebunan;
- i. pelaksanaan koordinasikan penegakan hukum di bidang perkebunan.

I. Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi perlindungan keberadaan kawasan hidrologis gambut, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan perkebunan, koordinasi penanganan dan pengendalian hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan serta pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pestisida sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. Seksi Kelembagaan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pendataan, pembinaan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan dan peternak serta fasilitasi sertifikasi lahan perkebunan rakyat.

III. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan inventarisasi dan rehabilitasi lahan dan perkebunan yang terkena kebakaran, pemberian rekomendasi Teknis Analisa mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perizinan perkebunan serta koordinasikan penegakan hukum di bidang perkebunan.



Bidang Budidaya Ternak

- Bidang Budidaya Ternak mempunyai tugas
Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
- Bidang Budidaya Ternak melaksanakan fungsi sebagaimana berikut:
 - a. pelaksanaan penetapan dan pengembangan kawasan peternakan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak;
 - c. pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak, ternak dan hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
 - e. pelaksanaan pendayagunaan dan fasilitasi penguatan modal investasi/dana bergulir usaha di bidang peternakan;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil ternak;

- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, perbanyakan dan penyaluran pakan dan benih hijauan pakan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan;

I. Seksi Kawasan dan Perbibitan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan dan pengembangan kawasan peternakan serta pembinaan, pengawasan dan penetapan standar mutu bibit ternak.

II. Seksi Penyebaran dan Pengembangan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan peredaran lalu lintas bibit ternak, ternak dan hewan lainnya, penyusunan dan sosialisasi pola pemeliharaan, penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya, pendayagunaan dan fasilitasi penguatan modal investasi/dana bergulir usaha di bidang peternakan serta pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran ternak dan hasil ternak.

III. Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, perbanyakan dan penyaluran pakan dan benih hijauan pakan serta pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.



Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan fungsi sebagaimana berikut:
 - a. pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;

I. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan surveillans penyakit melalui pengambilan spesimen/sampel serta pemberian vaksinasi hewan;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan ternak dan produk hewan;
- c. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular.

II. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- b. penyiapan bahan sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil dan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- c. penyiapan bahan analisis resiko dan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- d. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis penyelenggaraan rumah potong/tempat pemotongan hewan dan pemotongan hewan qurban;

III. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas : melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan obat hewandan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor serta penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan.

Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 118 orang yang terdiri dari PNS, Paramedis Keswan, Dokter Hewan dan PHTT (Pegawai Honorer Tidak Tetap). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32	29
2	Paramedis Keswan	19	18
3	Pegawai Honorer Tidak Tetap (PHTT)	58	53
Jumlah		109	100

Berdasarkan Tabel 1.1. Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Jumlah Pegawai terdiri atas PNS sebanyak 29% sudah termasuk Dokter Hewan 7 Orang, Paramedis Keswan sebanyak 18%, dan PHTT sebanyak 53% sudah termasuk dokter hewan 1 Orang.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	9	28
2	Golongan III	22	69
3	Golongan II	1	3
4	Golongan I	0	0
Jumlah		32	100

Berdasarkan Tabel 1.2. pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 3%, golongan III sebanyak 69%, dan golongan IV sebanyak 28%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Perkebunan dan Peternakan memerlukan tambahan tenaga Dokter Hewan.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata-2 (S2)	8	23
2	Strata-1 (S1)	20	57
3	Sarjana Muda/D3	2	6
4	SLTA	5	14
Jumlah		35	100

1.

Berdasarkan Tabel 1.3. Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Pendidikan terdiri atas Strata-2 (S2) sebanyak 23%, Strata-1 (S1) sebanyak 57%, Sarjana Muda/D3 sebanyak 6%, dan SLTA sebanyak 14%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan banyak ditempati oleh Strata-1 (S1) memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada memiliki Kualifikasi Pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pengisian Formasi Jabatan Struktural di Dinas Perkebunan

dan Peternakan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 3 Jabatan termasuk UPTD. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Staf Pelaksana

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	3
2	Eselon III	5	16
3	Eselon IV	4	13
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	34
5	Staf/Pelaksana	11	34
Jumlah		32	100

Berdasarkan Tabel 1.4. pegawai PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Jabatan dan Staf Pelaksana terdiri atas Eselon II sebanyak 3%, Eselon III sebanyak 16%, Eselon IV sebanyak 13% dan Staf/Pelaksana sebanyak 34%. Melihat komposisi tersebut Jabatan Struktural eselon terisi 10 Jabatan dari 13 Jabatan Struktural yang disediakan. Jabatan Fungsional tertentu ada 14 JFT dan yang terisi 11 JFT.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada Dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2023. Adapun Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

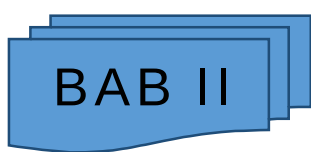
B. Analisis Capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2020, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Visi menjadi bagian penting dalam melaksanakan Tupoksi karena akan mendorong organisasi termotivasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan turunan dari kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan Potensi dan Keunggulan Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkepentingan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis Pertanian dan Peternakan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 adalah

Visi:

“ Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT) ”

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mencapai Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka ditetapkan 4 (Empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;**
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;

Dari Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pada **Misi Pertama**, yakni:

“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan”

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar sektor Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat

yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sektor Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi Program/Kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan yang dimaksudkan didalam Lakip ini adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Secara kolektif, tujuan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai sesuai dengan tujuan.

Adapun Tujuan Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan.

Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan ada 20 Sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Dalam
2. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit
3. Peningkatan Produksi Tanaman Kopi
4. Peningkatan Produksi Tanaman Pinang
5. Peningkatan Produksi Tanaman Coklat
6. Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman
7. Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan

8. Peningkatan Populasi Ternak Sapi
9. Peningkatan Populasi Ternak Kambing
10. Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras
11. Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler
12. Peningkatan Populasi Ternak Itik
13. Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB)
14. Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB)
15. Penurunan Angka Kematian Ternak
16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
17. Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kesmavet
18. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
19. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan
20. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Dinas Perkebunan dan Peternakan mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan:

Kode	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.27.01.2.13	Penataan Organisasi
3.27.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

5. Sasaran Program

Sasaran Program menunjukkan berfungsinya output pengawasan internal yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Sasaran Program sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Perkebunan
2. Meningkatnya Populasi Ternak

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
2. Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak
3. Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4. Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan
5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
6. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja)
7. Laporan Keuangan sesuai SAP

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 untuk seluruh indikator yang ada pada sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sesuai dengan target kinerja.

Berikut ini dapat disampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 dengan jumlah BELANJA Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 10.601.134.092 yang terdiri dari BELANJA

OPERASI Rp. 10.203.936.779 dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 397.197.313 Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	0,60 %
2.	Meningkatnya Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak	1,56%
3.	Meningkatnya Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4%
4.	Meningkatnya Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	4%
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM Predikat AKIP Laporan Keuangan sesuai SAP	87 B Sesuai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan pada Tahun 2023 masih diperoleh berdasar hasil pengumpulan Data Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Bidang yang meliputi Bidang:

1. Bidang Perkebunan
2. Bidang Perlindungan
3. Bidang Budidaya Agribisnis dan Peternakan
4. Bidang Keswan dan Kesmavet
5. Bidang Sekretariat

Selama satu Tahun berjalan dilakukan Pengumpulan Data dan Pengukuran serta Evaluasi atas Kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan Kinerja (LKjIP).

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai Dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan Indikator Kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan dilakukan melalui Media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada Pengukuran Kinerja, yang dilakukan adalah melakukan Pengukuran Pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan untuk menilai Capaian Kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relative (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja. Adapun Kategori Penilaian kinerja yang dimaksud disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

NO	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Nilai > 85	Sangat Baik
2.	Nilai 70 s/d 85	Baik
3.	Nilai 55 s/d 85	Cukup Baik
4.	Nilai < 55	Kurang Baik

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdapat 5 Sasaran Strategis yang harus diwujudkan pada Tahun ini. Adapun Hasil Pengukuran Target dengan Realisasi untuk masing-masing Indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,60	0,59	98,33	Baik
2.	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak (%)	1,56	1,13	72,44	Baik
3.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (%)	4	1,89	47,25	Cukup Baik

4.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (%)	4	2,66	66,50	Cukup Baik
5.	Peningkatan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Poin)	87	78,57	90,31	Baik
		Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B	BB	75,41	Baik
		Laporan Keuangan Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Baik

Berdasarkan table di atas, masing-masing realisasi indicator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang) Tahun ini dikurang Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun Sebelumnya dibagi Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun Sebelumnya dikali 100%.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$\begin{aligned} & \sum \text{Produksi Kelapa Dalam (Tahun 2023)} 57.295 \text{ Ton} + \sum \text{Produksi Kelapa Sawit (Tahun 2023)} \\ & 170.236 \text{ Ton} + \sum \text{Produksi Kopi (Tahun 2023)} 1.237 \text{ Ton} + \sum \text{Produksi Pinang (Tahun 2023)} 18.057 \text{ Ton} - \sum \text{Produksi Kelapa Dalam (Tahun 2022)} 57.295 \text{ Ton} + \sum \text{Produksi} \\ & \text{Kelapa Sawit (Tahun 2022)} 76.378 \text{ Ton} + \sum \text{Produksi Kopi (Tahun 2022)} 1.237 \text{ Ton} + \sum \\ & \text{Produksi Pinang (Tahun 2022)} 19.933 \text{ Ton} / \sum \text{Produksi Tanaman Perkebunan (Tahun} \\ & \text{2022)} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 246.825 \text{ Ton (Tahun 2023)} - 154.843 \text{ Ton (Tahun 2022)} / 154.843 \text{ (Tahun 2022)}$$

$$\times 100\%$$

$$= 91.982/154.843$$

$$= 0,59 \text{ (Realisasi Tahun 2023)}$$

Pada Tahun 2023 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan sebesar 0,59% dari Target 0,60% dengan Capaian 98,33% dan dinilai Baik.

2. Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak diukur dengan formulasi berupa Jumlah Populasi Ternak (Sapi, Kambing) Tahun ini dikurang Jumlah Populasi Ternak Tahun Lalu dibagi Jumlah Populasi Ternak Tahun Sebelumnya dikali 100%.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$\begin{aligned} & \sum \text{Populasi Ternak Sapi (Tahun 2023) } 22.128 \text{ Ekor} + \sum \text{Populasi Ternak Kambing (Tahun} \\ & \text{2023) } 45.460 \text{ Ekor} - \sum \text{Populasi Ternak Sapi (Tahun 2022) } 21.829 \text{ Ekor} + \sum \text{Populasi Ternak} \\ & \text{Kambing (Tahun 2022) } 45.001 \text{ Ekor} / \sum \text{Populasi Ternak Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)} \\ & \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 67.588 \text{ Ekor (Tahun 2023) } - 66.830 \text{ Ekor (Tahun 2022) } / 66.830 \text{ Ekor (Tahun 2022) } \\ \times 100\%$$

$$= 1,13\% \text{ (Realisasi 2023)}$$

Pada Tahun 2023 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak sebesar 1,13% dari Target 1,56% dengan Capaian 72,44% dan dinilai Baik.

3. Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun ini ditambah Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Lalu dibagi Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Sebelumnya.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$= \text{Rp. } 800.000 \text{ (Tahun 2023) } + \text{Rp. } 900.000 \text{ (Tahun 2022) } / \text{Jumlah Realisasi Retribusi} \\ \text{Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)}$$

$$= \text{Rp. } 1.700.000 / \text{Rp. } 900.000 \text{ (Tahun 2022)}$$

$$= 1,89 \text{ (Realisasi 2023)}$$

Pada Tahun 2023 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebesar 1,89 dari Target 4% dengan Capaian 47,25% dan dinilai Cukup Baik.

4. Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun ini ditambah Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun Lalu dibagi Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun Sebelumnya.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. 60.320.000 (Tahun 2023)} + \text{Rp. 36.362.600 (Tahun 2022)} / 36.362.600 \text{ (Tahun 2022)} \\ &= \text{Rp. 96.682.600} / \text{Rp. 36.362.600 (Tahun 2022)} \\ &= 2,66 \text{ (Realisasi 2023)} \end{aligned}$$

Pada Tahun 2023 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan sebesar 2,66 dari Target 4% dengan Capaian 66,50% dan dinilai Cukup Baik.

5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Skor)

Indikator Kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Skor) diukur dengan formulasi berupa Jumlah Rata-rata Nilai IKM di 11 Kecamatan berdasarkan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey mengisi Kuisioner oleh Masyarakat dilihat dari Pelayanan Kinerja Puskesmas di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$\begin{aligned} \text{IKM} &= \text{Total dari Nilai Persepo Per Unsur} / \text{Total Unsur yang terisi} \times \text{Nilai Penimbang} \\ \text{Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Menurut Kecamatan} &= \text{Total Nilai IKM 11 Kecamatan} \\ &= (864.25) / 11 = 78,57 \text{ (Nilai IKM)} \\ \text{Nilai Penimbang} &= 78,57 \text{ Skor } 3,14 \text{ Kinerja} = \text{Baik} \\ \text{Pada Tahun 2023 Realisasi Indikator Kinerja Nilai IKM Skor } &78,57 \text{ dari Target Skor } 87 \\ &\text{dengan Capaian } 90,31 \% \text{ dan dinilai Baik.} \end{aligned}$$

6. Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)(Nilai)

Indikator Kinerja Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) diukur dengan formulasi berupa berdasarkan Hasil Evaluasi oleh Kemenpan RB dengan Realisasi Nilai 75,41 Capaian BB dinilai Sangat Baik

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian oleh Kemenpan RB dinilai Baik

7. Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Indikator Kinerja Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) diukur dengan formulasi berupa berdasarkan Laporan Keuangan Sesuai SAP dengan Realisasi Sesuai Capaian Sesuai dinilai Baik

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja	
				2021	2022
1.	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	0,30	1
2.	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak (%)	%	0,73	89,03
3.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	%	2,20	29,50
4.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Penjualan Hewan	%	0	29,75
5.	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor)	Skor	0	91,91
		Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	CC	B

		Laporan Keuangan Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	SAP	Sesuai	Sesuai
--	--	--	-----	--------	--------

Perhitungan Formulasi Capaian Kinerja Tahun 2021

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Realisasi Produksi Kelapa Dalam (Tahun 2021) 57.292 Ton + Realisasi Produksi Kelapa Sawit (Tahun 2021) 76.375 Ton + Realisasi Produksi Kopi (Tahun 2021) 1.237 Ton + Realisasi Produksi Pinang (Tahun 2021) 16.136 Ton - Realisasi Produksi Kelapa Dalam (Tahun 2020) 51.398 Ton + Realisasi Produksi Kelapa Sawit (Tahun 2020) 47.806 Ton + Realisasi Produksi Kopi (Tahun 2020) 1.237 Ton + Realisasi Produksi Pinang (Tahun 2020) 16.136 Ton / Jumlah Produksi Perkebunan (Tahun 2020)

$$= 151.040 \text{ Ton (Tahun 2021)} - 116.577 \text{ Ton (Tahun 2020)} / 116.577 \text{ Ton (Tahun 2020)}$$

$$= 34.463 / 116.577 = 0,30$$

2. Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak

$\sum$ Populasi Ternak Sapi (Tahun 2021) 21.474 Ekor + $\sum$ Populasi Ternak Kambing (Tahun 2021) 44.951 Ekor - $\sum$ Populasi Ternak Sapi (Tahun 2020) 21.204 Ekor + $\sum$ Populasi Ternak Kambing (Tahun 2020) 44.742 Ekor / $\sum$ Populasi Ternak Tahun Sebelumnya (Tahun 2020) x 100%

$$= 66.425 \text{ Ekor (Tahun 2021)} - 65.946 \text{ Ekor (Tahun 2020)} / 65.946 \text{ Ekor (Tahun 2020)}$$

$$\times 100\%$$

$$= 479 \text{ Ekor} / 65.946 \text{ Ekor} \times 100\% = 0,73\%$$

3. Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun ini ditambah Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Lalu dibagi Jumlah Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Sebelumnya.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

$$= \text{Rp. } 5.030.000 \text{ (Tahun 2021)} + \text{Rp. } 4.200.000 \text{ (Tahun 2020)} / \text{Rp. } 4.200.000 \text{ (Tahun 2020)}$$

= Rp. 9.230.000 / Rp. 4.200.000 (Tahun 2020)

= 2,20 (Realisasi 2021)

4. Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan diukur dengan formulasi berupa Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun ini ditambah Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun Lalu dibagi Jumlah Realisasi Hasil Penjualan Hewan Tahun Sebelumnya.

Dengan Perhitungan Formulasi sbb:

= Rp. 0 (Tahun 2021) + Rp. 0 (Tahun 2020) / Rp. 0 (Tahun 2020) = 0

5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Skor) Pada Tahun 2021 = 0 karena Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 belum ada.

6. Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021 Bernilai CC Cukup Baik (memadai) pada Tahun 2021 Skor 65 Informasi di terima dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Laporan Keuangan Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), Dinas Perkebunan dan Peternakan Pada Tahun 2021 Laporan Keuangan sudah sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Perhitungan Formulasi Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)

Capaian (%) = Realisasi Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Tahun 2022) / Target
Produksi Tanaman Perkebunan (Tahun 2022) x 100%
= 0,004 / 0,40 x 100%
= 1%

2. Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi Peningkatan Populasi Hewan Ternak (Tahun 2022)} / \text{Target} \\ &\quad \text{Populasi Hewan Ternak (Tahun 2022)} \times 100\% \\ &= 1,38 / 1,55 \times 100\% \\ &= 89,03\%\end{aligned}$$

3. Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (Tahun} \\ &\quad \text{2022)} / \text{Target Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (Tahun 2022)} \times \\ &\quad 100\% \\ &= 1,18 / 4 \times 100\% \\ &= 29,50\%\end{aligned}$$

4. Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (Tahun 2022)} / \text{Target} \\ &\quad \text{Hasil Penjualan Hewan (Tahun 2022)} \times 100\% \\ &= 1,19 / 4 \times 100\% \\ &= 29,75\%\end{aligned}$$

5. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

$$\begin{aligned}\text{Capaian (\%)} &= \text{Realisasi IKM (Tahun 2022)} / \text{Target IKM (Tahun 2022)} \times 100\% \\ &= 78,12 / 85 \times 100\% \\ &= 91,91\%\end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 3.3 tampak bahwa capaian kinerja mengalami Kenaikan dari Tahun 2020 ke Tahun 2021.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dengan menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target. Berdasarkan Tabel 3.2, maka analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan dengan Capaian 98,33% dari Target 0,60% Realisasi 0,59% Hal ini disebabkan karena Peningkatan Produksi untuk Kelapa Sawit dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 0,6%, Kelapa Dalam 0,11%, Kopi

Liberika tidak ada Kenaikan 0% dan Pinang 0,24%. Berdasarkan Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan yang relative kecil disebabkan karena banyaknya Tanaman yang sudah Tua di Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain menurunnya harga jual di pasar sedangkan upah panen cukup mahal, sehingga banyak buah yang tidak dipanen. Hal ini juga berdampak pada menurunnya keinginan petani untuk melakukan replanting terhadap kebun yang dimilikinya. Sehingga replanting dilakukan dengan menggunakan benih yang diproduksi sendiri, bukan yang direkomendasikan. Luas Areal Tanaman Perkebunan menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha) Kondisi Tahun 2021 dan 2022 pada Tanaman Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi dan Pinang dan Juga Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ton) 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1

Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Pada Jenis Tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa Dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), 2021 dan 2022

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa Dalam	
	2021	2022	2021	2022
Mendahara	2.075	2.075	21.604	21.604
Mendahara Ulu	12.400	16.381	751	751
Geragai	4.405	4.405	4.560	4.560
Dendang	5.597	5.597	435	435
Muara Sabak Barat	1.289	1.299	629	629
Muara Sabak Timur	1.575	1.575	9.417	9.628
Kuala Jambi	42	42	7.283	7.379
Rantau Rasau	3.083	3.083	954	954
Berbak	829	829	146	146
Nipah Panjang	1.305	1.305	7.246	7.262
Sadu	1.272	1.272	5.496	5.564
Tanjung Jabung Timur	33.872	37.863	58.521	58.912

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Tahun 2015, produksi sawit nasional mencapai 31,07 juta ton. Angka tersebut terus meningkat tiap tahun hingga pada 2016 produksi sawit sebesar 31,73 ton. Di Tahun 2018, Minyak sawit dan inti sawit Indonesia tercatat mencapai 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil (CPO) dan 8,11 juta ton palm kernel oil (PKO). Dengan produksi sawit yang begitu melimpah, sawit berperan dalam menyumbang perekonomian negara.

Devisa ekspor Indonesia dari Industri Kelapa Sawit memperlihatkan capaian hingga menyentuh angka USD 39,28 miliar pada 2022. Angka tersebut menjadi pendapatan tertinggi dari sektor Perkebunan Kelapa Sawit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah Produksi Sawit dan Devisa Ekspor yang mengalami kemajuan pesat tidak terlepas dari luas lahan Perkebunan kelapa sawit yang terus meningkat. Hingga 2022, Indonesia telah memiliki 700 Perkebunan Kelapa Sawit dengan total luas mencapai 14,98 Juta Hectare, menurut BPS. Akan Tetapi, Kementerian Pertanian memperkirakan luas total Perkebunan kelapa sawit mencapai 15,3 Juta Hectare.

Sebagai informasi, angka luas Perkebunan kelapa sawit yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementerian Pertanian terdapat perbedaan. Untuk mengetahui perkembangan luas Perkebunan sawit sejak dua decade lalu, GoodStats menggunakan data yang lebih komprehensif dari Kementerian Pertanian.

Merujuk pada Data Kementan dalam Statistik Unggulan 2020-2022, lonjakan luas area Perkebunan kelapa sawit telah terjadi beberapa kali. Pertama, pada tahun 2013, penambahan luas Perkebunan kelapa sawit mencapai 892 Hectare. Angka ini cukup besar dibandingkan dengan perluasan lahan yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Rata-rata luas lahan Perkebunan kelapa sawit hanya berkisar pada 400-500 hectare pertahunnya.

Kedua, lonjakan luas lahan terbesar terjadi pada 2017. Luas Lahan Perkebunan kelapa sawit pada 2016 sekitar 11,2 Juta Hectare dan Bertambah pesat menjadi 14 Juta

Hectare. Ini artinya, perluasan lahan Perkebunan kelapa sawit terjadi secara besar-besaran hingga penambahan area menyentuh angka 2,8 juta hectare dalam satu tahun.

Akan tetapi, perluasan Perkebunan kelapa sawit bukan tanpa masalah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 74 kejadian konflik agrarian di sektor Perkebunan dengan luas 276.162,052 Hectare. Dari Jumlah tersebut, lebih dari 50% di antaranya konflik yang terjadi di sektor Perkebunan sawit.

Oleh karena itu, untuk mengatasi wilayah Perkebunan kelapa sawit yang semakin meluas, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang membatasi Penggunaan lahan sebagai Perkebunan kelapa sawit. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam PP tersebut, Perusahaan Perkebunan kelapa sawit hanya boleh memiliki luas Perkebunan maksimal 100.000 Hectare.

Sektor Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih didominasi oleh Perkebunan kelapa dalam dan Kelapa Sawit. Komoditas Perkebunan yang perlu untuk didukung pengembangannya guna ditawarkan kepada investor baik berupa perluasan penanaman komoditas bentuk pengolahan guna peningkatan nilai jual, antara lain komoditas pinang, kelapa sawit, kelapa dalam dan Kopi.

Tabel 2
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Pada Jenis Tanaman Kopi Liberika dan Pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), 2021 dan 2022

Kecamatan	Kopi Liberika		Pinang	
	2021	2022	2021	2022
Mendahara	2.044	2.051	2.796	3.041
Mendahara Ulu	130	130	612	561
Geragai	39	39	264	260
Dendang	163	163	267	309
Muara Sabak Barat	101	101	819	801
Muara Sabak Timur	459	459	2.609	2.589
Kuala Jambi	391	391	783	808

Rantau Rasau	53	53	214	215
Berbak	3	3	116	235
Nipah Panjang	59	59	380	479
Sadu	42	42	582	600
Tanjung Jabung Timur	3.484	3.491	9.442	9.898

Tabel 3
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan Pada Jenis Tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa Dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ton), 2021 dan 2022

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa Dalam	
	2021	2022	2021	2022
Mendahara	4.450	4.450	18.059	20.672
Mendahara Ulu	28.341	28.341	705	705
Geragai	9.097	9.097	3.968	3.968
Dendang	15.177	15.177	489	489
Muara Sabak Barat	2.115	2.115	549	549
Muara Sabak Timur	3.290	3.290	10.125	10.125
Kuala Jambi	68	113	5.701	6.052
Rantau Rasau	4.425	7.492	790	1.044
Berbak	738	1.468	169	189
Nipah Panjang	1.194	2.445	6.937	7.597
Sadu	1.120	2.390	5.089	5.905
Tanjung Jabung Timur	47.806	76.378	51.398	57.295

Tabel 4
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan Pada Jenis Tanaman Kopi Liberika dan Pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ha), 2021 dan 2022

Kecamatan	Kopi Liberika		Pinang	
	2021	2022	2021	2022
Mendahara	823	823	4.454	5.654
Mendahara Ulu	72	72	1.036	1.312
Geragai	7	7	268	598

Dendang	7	7	280	584
Muara Sabak Barat	36	36	1.094	1.574
Muara Sabak Timur	152	152	5.745	5.927
Kuala Jambi	78	78	1.557	1.737
Rantau Rasau	8	8	254	503
Berbak	3	3	160	253
Nipah Panjang	32	32	681	887
Sadu	19	19	607	904
Tanjung Jabung Timur	1.237	1.237	16.136	19.933

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Luas Areal Tanaman Perkebunan untuk Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Kopi Liberika dan Pinang mengalami Penambahan Luas Areal Dari Tahun 2021 ke 2022 yaitu Kelapa Sawit bertambah 3.991 Ha; Kelapa Dalam bertambah 391 Ha ; Kopi Liberika bertambah 7 Ha; Pinang bertambah 456 Ha. Penambahan Luas Lahan ini bisa mempengaruhi Peningkatan Produksi yang mana Luas Lahan merupakan salah satu Faktor Produksi yang mempengaruhi hasil produksi. Faktor produksi yang mempengaruhi hasil produksi adalah Luas Lahan, pemupukan, tenaga kerja, pestisida (Daniel, 2002).

Pada Tabel 4 terlihat Produksi Perkebunan pada Jenis Tanaman Kopi bersifat Stagnan belum ada Peningkatan dari Tahun 2021 sampai ke Tahun 2022 karena Kopi Liberika Sebagian belum siap panen akan siap dipanen Ketika berumur 2,5 – 3 Tahun. Panen Raya terjadi dalam 4-5 Bulan dengan interval pemetikan 2 minggu sekali pada pohon yang sama. Kopi Liberika adalah Jenis Kopi yang berasal dari Liberia, dan Afrika Barat. Kopi ini dapat tumbuh setinggi 9 meter dari tanah. Pada Abad-19, Jenis kopi ini didatangkan ke Indonesia untuk menggantikan Kopi Arabika yang terserang oleh Hama Penyakit. Kopi yang dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kondisi Lahan Gambut yang cocok adalah Kopi Liberika. Kopi Liberika ini sekarang masih dalam tahap Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di Indonesia selama ini lebih populer jenis kopi Robusta dan Arabika, namun sebenarnya ada satu jenis kopi lain yang tidak kalah memiliki cita rasanya yang khas, yaitu kopi Liberika. Di Provinsi Jambi, Kopi Liberika telah berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama pada Lahan Gambut. Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pemekaran dari Tanjung Jabung, mempunyai kondisi biofisik dan iklim yang sama, namun kopi Liberika belum berkembang Luas. Kopi Liberika dikenal sebagai kopi khas gambut

karena kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan baik di tanah gambut sementara kopi jenis lain (Arabica dan Robusta) tidak bisa tumbuh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Kopi Liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari Hasil Penelitian diperoleh kelas kesesuaian lahan untuk tanaman Kopi Liberika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur umumnya sesuai marginal (S3). Untuk Pengembangan Kopi Liberika di Tanjung Jabung Timur, diperlukan teknologi seperti; ameliorasi lahan dengan pemberian kapur dan penambahan bahan organik untuk meningkatkan kemampuan retensi hara, pemupukan lengkap untuk meningkatkan ketersediaan hara, perbaikan system drainase, dan pengaturan system tata air tanah dan tinggi permukaan air tanah harus di atas lapisan bahan sulfidik. Dengan adanya Peta kesesuaian lahan skala 1:50.000 mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi berbagai komoditas pertanian yang sesuai untuk dikembangkan, factor pembatas pertumbuhan, luas dan penyebarannya di suatu wilayah (Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi/JIITUJ, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2 Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Bogor, 2021).

Rencana Pengembangan Kopi Liberika bakal segera terwujud. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama PT. Petro China Jabung Ltd melakukan Kunjungan Kerja ke sejumlah lokasi pengembangan Kopi di Jember dan Bondowoso Jawa Timur. Kunker yang dipimpin langsung Bupati Tanjung Jabung Timur H. Romi Hariyanto dan Ginanjar Communication Manager Petro China bersama sejumlah Kepala OPD turut dalam rombongan. Petro China diketahui adalah pihak yang nantinya support dan terlibat aktif mendukung program pengembangan Kopi Liberika di Tanjabtim. Menurut Bupati Tanjung Jabung Timur Kopi Liberika layak dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memang sebagian besar tanahnya bergambut. Upaya tersebut bukan tanpa alasan. Bupati Tanjung Jabung Timur ingin Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergelut di Bidang Perkebunan punya pilihan komoditas selain kelapa sawit untuk dikembangkan.

- b. Sasaran Peningkatan Populasi Hewan Ternak dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak dengan Capaian 72,44% pada Jumlah Populasi Ternak Sapi dan Kambing karena terjadi Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB dan Peningkatan Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan terjadi persentase penurunan Angka Kematian Ternak serta meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ternak.

- c. Sasaran Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan Capaian terlaksana Cukup baik. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2012 dan diundangkan Tanggal 26 Desember 2012 berlaku Tanggal 26 Desember 2012. Hambatan Pendapatan Daerah untuk Sementara tidak dilaksanakan penyediaan tempat pelelangan pasar ternak terkait wabah PMK sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian RI Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak untuk melakukan penutupan sementara pasar hewan diwilayah wabah PMK.
- d. Sasaran Peningkatan Hasil Penjualan Hewan dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan dengan Capaian Cukup Baik karena tidak adanya ternak yang tidak Produktif/Majir untuk di jual.

C. REALISASI KEUANGAN

Tahun 2023 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 6 Program dan 18 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Total APBD sebesar Rp. 10.601.134.092 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 10.203.936.779 dan Belanja Modal sebesar Rp. 397.197.313,- Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 secara umum dapat dilaksanakan semua dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.925.791.473 (93,63%) dengan realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 9.548.707.473 (93,58%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 377.084.000 (94,94%). Rincian anggaran dan realisasi keuangan per program terdapat pada Tabel 3.9

TABEL 3.9
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program
Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.478.501.835	6.212.418.782	95,89
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.407.203.553	1.367.160.210	96,55
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	624.179.219	595.285.177	95,37
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.530.236.435	1.292.241.420	84,45
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	249.106.450	176.223.374	70,74
6.	Program Penyuluhan Pertanian	311.906.600	282.462.510	90,56
	Jumlah	10.601.134.092	9.925.791.473	93,63

Anggaran dan realisasi keuangan per jenis belanja terdapat pada Tabel 3.10

TABEL 3.10
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	10.601.134.092	9.925.791.473	93,63
Belanja Operasi	10.203.936.779	9.548.707.473	93,58
Belanja Modal	397.197.313	377.084.000	94,94

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Produksi Perkebunan:

Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Perkebunan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Yaitu: 1) Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam 2) Persentase Peningkatan Produksi Kopi 3) Persentase Peningkatan Produksi Pinang. Persentase Capaian 2023 masih memakai angka Sementara (ASEM) karena Angka Tetap diperoleh sekitar Bulan Juli. Jika Dibandingkan Tahun 2021 dengan 2022 Kelapa Dalam Mengalami Pertumbuhan sebesar 0,6%. Realisasi Tahun 2023 0,59% dari Target 2023 0,60% hal ini disebabkan masih rendahnya produktifitas Kelapa Dalam karena tanaman Kelapa dalam yang ada banyak sudah tua dan tidak produktif lagi sedangkan kegiatan pengembangan dan replanting kelapa dalam dilakukan dengan menggunakan Benih yang diproduksi sendiri dikarenakan Permasalahan yang dihadapi antara lain menurunnya harga kelapa di pasar, dimana pada tahun 2018 berada pada kisaran harga Rp.800/butir sedangkan Upah Panen cukup mahal sehingga banyak buah kelapa yang tidak dipanen. Hal ini berdampak pada menurunnya keinginan petani untuk melakukan replanting tanpa dari rekomendasi dari Blok Penghasil Tinggi (BPT) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 120/Kpts/KB.020/12/2016 tentang penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Tanaman Kelapa Dalam Unggul Lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Blok Penghasil Tinggi (BPT) adalah Kebun Kelapa yang kompak dengan Luas Minimal 2,5 Ha dengan produksi lebih dari 70 Butir/pohon/tahun dengan persyaratan tertentu (BSNI 2006). Lokasi BPT Kelapa Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi (seluas 25 Ha dengan Jumlah Pohon Induk Terpilih (PIT) 248 Pohon dan di Desa Alang-alang Kecamatan Muara Sabak Timur (seluas 50 Ha dengan Jumlah PIT 600 Pohon). BPT ini memiliki potensi yang

besar untuk berkembang karena pasarnya cukup luas yaitu memenuhi kebutuhan benih unggul untuk kebun kelapa di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan perkebunan terluas di Provinsi Jambi.

2. Sasaran Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Daging

Capaian Sasaran Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Daging dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yaitu: 1) Persentase Peningkatan Populasi Ternak 2) Persentase Peningkatan Produksi Daging. Capaian Populasi Hewan Ternak 72,44% dari Target 1,56% Realisasi 1,13% dengan kriteria penilaian kinerja Cukup Baik.

Dimana dari dua indikator, realisasi indikator populasi ternak khususnya ternak sapi tinggi. Hal ini disebabkan Keberhasilan Capaian Kinerja Populasi ternak disumbangkan dari angka kelahiran ternak yang cukup tinggi yang merupakan keberhasilan dari Program SIWAB APBN dan APBD II.

4.2. Saran-Saran

Hal-hal yang disarankan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Tahun Mendatang antara lain:

-) Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas lintas bidang agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai target.
-) Menoptimalkan Sistem Pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak awal.
-) Memperbaiki Sistem Pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
-) Meningkatkan Pembinaan kepada pelaksana kegiatan untuk memahami pedoman teknis sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik secara teknis dan administrasi
-) Meningkatkan Pemahaman tentang Penetapan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 kami sampaikan untuk bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja ditahun-tahun mendatang.

